



DPRD Badung Digoyang Isu Pungli

Nilainya Disebut Capai Ratusan Juta

MANGUPURA - Kabar tak sedap menghampiri DPRD Badung. Lembaga wakil rakyat itu diisukan banyak melakukan pungutan liar (pungli), bahkan cenderung kearah pemerasan. Tudingan miring ini dialamatkan pada Komisi I yang mengawasi masalah perizinan.

Bahkan, informasi ini menjadi kasak-kusuk alias perbincangan hangat di internal DPRD Badung. Kabarnya, sejumlah oknum anggota Komisi I diduga sengaja mencari pembangunan akomodasi wisata seperti hotel dan villa yang perizinannya bermasalah. Permasalahan izin itu lantas dijadikan modus untuk "memeloroti" investor yang dibelit kasus perizinan.

Dugaan praktik pungli ini cukup masuk akal. Sebab, pembangunan hotel dan vila di Badung cukup masif. Terutama di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sejumlah hotel bintang terus dibangun. Yang mencengangkan, jumlah uang yang diminta mencapai ratusan

Kabar dari mana itu? Kabar nggak jelas, sepengetahuan saya tidak ada seperti itu."

I Nyoman Ardana

Ketua Komisi I DPRD Badung

juta rupiah. Sumber koran ini di internal dewan Badung menyebutkan, besar kecil permintaan uang tergantung proyek hotel serta lobi investor. "Belum lama ini ada salah satu hotel berbintang diminta Rp 750 juta, tapi informasinya dikasih Rp 500 juta," ungkap sumber koran ini yang mewanti-wanti agar tidak dikorbankan namanya beberapa waktu lalu.

Masih menurut keterangan sumber koran ini, transaksi permintaan dan pemberian uang itu dilakukan di tempat yang sudah disepakati. Salah satunya di sebuah rumah makan ternama di Jalan Gatot Subroto (Gatsu), Denpasar. Setelah mendapat uang, kemudian uang dibagi kepada beberapa oknum.

Namun, kadang hanya dinikmati segelintir oknum anggota dewan.

Sumber koran ini yang mengaku cukup hafal dengan pola permintaan uang pada investor ini menambahkan, sebagai imbalan pengurusan izin tersebut dewan janji pada investor akan membantu memperlancar proses pengurusan perizinan. Setelah uang didapat, biasanya oknum dewan berusaha meminta kepala SKPD terkait agar membantu mengeluarkan izin. Guna memastikan kabar tersebut, koran ini mencoba menghubungi Ketua Komisi I Nyoman Ardana. Saat dikonfirmasi Ardana membantah keras kabar tersebut. "Kabar dari mana itu? Kabar nggak jelas, sepengetahuan saya tidak ada seperti itu," bantah Ardana. Disebutkan jika yang diduga terlibat adalah oknum komisi I, Ardana kembali membantah. Dia menegaskan, dewan selalu berjalan sesuai prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Politisi Demokrat itu mengaku kesulitan mengungkap kebenaran kabar tersebut jika tidak ada bukti yang jelas dan kuat. **(san/han)**

Edisi : Senin, 29 Juni 2015

Hal : 24